

TAJUK RENCANA

Merdeka dari Covid-19

AKHIRNYA Presiden Jokowi meminta, agar biaya tes PCR atau reaksi rantai polimerase untuk mendeteksi Covid-19 diturunkan biayanya. Harga yang dianggap tinggi, termasuk salah satu penyebab mengapa tes tersebut seret dilakukan. Diharapkan nantinya, testing Covid-19 makin diperbanyak sehingga akan memudahkan mata rantai penanganan pandemi (KR 16/8). Selain itu Presiden juga meminta agar hasil tes segera bisa diketahui 24 jam. Selama ini hasil tes baru bisa diketahui sampai 3 hari bahkan lebih, padahal hasilnya segera ditunggu untuk mengetahui langkah yang harus dilakukan.

Sebelumnya Kementerian Kesehatan menetapkan basalen harga tarif tertinggi pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah Rp 900.000. Sebelum ada Surat Edaran tersebut biaya tes bisa di atas Rp 1.000.000. Mengam di seluruh dunia, harga real time tes PCR bisa berbeda-beda. Di India misalnya, jika di kurs rupiah menjadi Rp 135.000. Menurut keterangan Kemenkes, memang tes PCR di Kawasan ASEAN itu berbeda-beda. Misalnya di Vietnam Rp 460.000, di Malaysia Rp 510.000,-, Filipina sekitar Rp 437.000,-smpai Rp 1,6 juta. Di Amerika Serikat sekitar Rp 1,5 juta, di Rusia Rp 500.000 dan di Turki Rp 422.000. Maka Presiden Jokowi minta di Indonesia, pada kisaran Rp 450.000 sampai Rp 550.000. Dengan adanya perintah Presiden, Kemenkes harus segera mengubah Surat Edaran, menurunkan angka yang jumlahnya harus pasti. Tujuannya, agar mengurangi beban rakyat yang ingin melakukan tes PCR mandiri. Karenanya, Presiden masih hanya menetapkan angka kisaran. Kebijakan tersebut perlu diapresiasi. Meski agak terlambat, namun kita mengapresiasi karena kewajiban tes PCR diberlakukan untuk banyak kegiatan. Untuk tes penelusuran memang masih

gratis seperti di puskesmas misalnya, namun untuk yang bersifat mandiri agar cepat memperoleh hasil. Agar selaras dengan maksud Presiden, alangkah baiknya harga tes seperti Antigen juga musti diturunkan. Berapa harganya? Ini yang perlu ditetapkan dengan hati-hati, agar vendor yang memang mengadakan semuanya yang berhubungan dengan Antigen atau PCR tetap berjalan. Namun jangan terlalu banyak mengambil keuntungan. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan pada kebutuhan bangsa agar bisa cepat keluar dari pandemi.

Penetapan harga yang pasti, tidak merugikan siapapun. Namun jika dipastikan terlalu tinggi, bisa jadi malah membebani niat masyarakat yang ingin testing mandiri. Rakyat sudah dalam kondisi terpuruk akibat PPKM Darurat, sehingga makin kerepotan ketika harus melakukan testing mandiri dengan biaya tinggi.

Jika biaya testing menggunakan PCR atau Antigen mudah terjangkau, tentu masyarakat antusias untuk bisa melaksanakan test mandiri. Hal tersebut tentu juga akan menguntungkan pemerintah untuk lebih cepat mematahkan mata rantai penularan virus.

Hal ini menarik lagi, bila dikaitkan pernyataan Presiden tentang menurunnya keterisian rumah sakit atau ebad occupancy ratio (BOR) di sejumlah daerah, setelah kebijakan PPKM Darurat diberlakukan. Sampai dengan 15 Agustus misalnya, BOR di DKI Jakarta sudah pada kisaran 29,4%, Jateng 38,3%, DIY 54,7% dan Jatim 52,3%. Artinya usaha yang dilakukan selama ini ada hasilnya. Karena itu, adanya kebijakan penurunan biaya testing PCR, apalagi Antigen akan beriringan dengan penggalakan vaksinasi akan makin menurunkan angka BOR, sehingga kita bisa segera merasakan indahnya negara merdeka dari Covid-19. (***)

Pandemi, Kelaparan, dan 'Elite Capture'

Riza Multazam Luthfy

BERDASARKAN penelusuran Food and Agriculture Organization (FAO), pandemi Covid-19 memicu tingkat kemiskinan dan kelaparan banyak warga dunia. Organisasi pangan dan pertanian yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut menyinyalir, wabah ini ternyata memunculkan kasus-kasus kelaparan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Di negeri ini, bencana kelaparan mempunyai akar yang kuat. Sejak dahulu kala, rakyat terbiasa hidup lapar dan melalui hari-harinya dengan cukup berat. Celakanya, misi kolonialisme turut menggenapi penderitaan rakyat.

Catatan Historis

Pada masa penjajahan Belanda, sistem tanam paksa melahirkan bencana kelaparan yang hebat. M Shaleh Putehena (2007: 319) mencatat bahwa hasil sistem tanam paksa telah memberi keuntungan yang melimpah bagi Belanda sekaligus berhasil menutupi defisit kerajaan. Di satu sisi, sistem tersebut genap menguntungkan pemerintah Belanda. Namun, di sisi lain, ia menghadirkan kesengsaraan bagi masyarakat Jawa. Kelaparan yang berlangsung antara tahun 1843 dan 1848 berimbas pada merosotnya jumlah penduduk secara drastis.

Berdasarkan catatan historis, awal tahun 1903 menandai terjadinya kelaparan di Indramayu. Setelah dua kali gagal panen, sejumlah kawasan di sana mengalami bencana kelaparan. Yang paling merasakan dampaknya yaitu penduduk tanah-tanah partikelir. Sayangnya, kedua pribumi enggan melaporkan kesengsaraan warganya. Saat diadakan konferensi para kepala pribumi dengan Residen, Asisten, dan Kontrolir, terlontar kritik tajam. Setiap kuwu (kepala desa) dinilai bertanggung jawab atas munculnya kesengsaraan di desanya. Para pemimpin lokal tersebut bakal dipecat apabila ada orang miskin di desa berkeluh kesah. Setelah Indonesia terlepas dari belenggu



mengangkat harkat dan martabat *wong cilik* justru terhambat perilaku elite lokal. Di kawasan perdesaan, kue kesejahteraan seringkali hanya dinikmati kelas sosial tertentu, sehingga menghapus peluang orang desa lainnya untuk memperbaiki taraf hidup. Ini berarti, sebagian orang kehilangan kesempatan yang setara untuk meraih distribusi kekayaan.

Di sinilah terjadi penyerobotan hak rakyat oleh pihak-pihak yang memiliki relasi dan kuasa. Berlakulah *elite capture*, yang dikenal sebagai sikap atau tindakan individu atau kelompok untuk memengaruhi lahirnya kebijakan. Pengambilan sikap atau tindakan ini bukan bermaksud mengutamakan kepentingan komunal, melainkan lebih bertujuan mendatangkan keuntungan pribadi. Padahal, konstitusi genap melindungi hajat hidup rakyat. Ketentuan bahwa setiap warga negara berhak meraih kesejahteraan lahir dan batin genap digariskan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Munculnya fenomena di atas menyebabkan para pemikir dan akademisi meragukan konsep negara kesejahteraan yang berkontribusi dalam perlindungan sekaligus pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warga negara. Bahkan, tak sedikit dari mereka menganggapnya sebagai negara khayalan (utopia) belaka. □

**Riza Multazam Luthfy, peneliti dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimi artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah bisa dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/Scan KTP
atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.
Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Euforia 'Sumbangan 2T'

BERITA 'sumbangan 2 triliun' dari keluarga Akidi Tio mengejutkan banyak pihak. Sumbangan tersebut diberikan untuk membantu penanganan pandemi di Sumatera Selatan. Dengan nilai yang fenomenal, dalam waktu singkat berita tersebut menjadi perhatian nasional. Sumbangan dijanjikan akan dicairkan 2 Agustus 2021, namun hingga waktu yang dijanjikan, ternyata uang yang akan disumbangkan tidak tersedia.

Saya memperhatikan ada hal menarik dari kejadian ini, yaitu euforia pada nilai sumbangan yang fenomenal. Rasa 'bahagia' yang berlebihan ini sejenak membuat banyak pihak terbuai dan larut pada suasana. Ironisnya, pihak yang berwenang seperti Kapolda Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan telanjur melakukan publikasi penyerahan simbolis sumbangan tersebut tanpa memastikan kebenaran faktanya. Banyak pihak menyangkan publikasi tersebut, dan mengatakan seharusnya publikasi simbolis dilakukan ketika memang sudah dipastikan dananya memang benar-benar ada. Karena kelalaiannya, Kapolda Sumatera Selatan telah meminta maaf atas kejadian tersebut.

Euforia yang lebih dahsyat justru terjadi di masyarakat dan menjadi perbincangan publik. Saya mengamati bahwa masih banyak warga masyarakat yang belum menaati protokol mengakses internet, atau saya menyebutnya dengan prosesnet. Sewajarnya, ketika menerima suatu informasi, seseorang harus melakukan Tahan, Telaah, dan terakhir adalah Tentukan sikap (3T).

Pertama adalah tahan yaitu tidak langsung mengambil sikap pada suatu informasi tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

Jumlah sumbangan yang sangat fantastis bisa jadi membuat seseorang tidak bisa menahan diri untuk mengambil sikap, yaitu menerima begitu saja informasi tersebut. Kedua adalah telaah, setelah menahan sikap, seharusnya seseorang melakukan tiga hal berikut, yaitu mengecek asal-usul informasi, memeriksa isi informasi, dan ketiga membandingkan dengan informasi lain. Protokol terakhir adalah menentukan sikap, setelah menahan diri dan menelaah, barulah seseorang dapat dengan jernih menentukan sikap, apakah menerima atau menolak informasi tersebut.

Mengapa hal ini penting? Karena saya sangat menyangkan ketika isu tersebut dimanfaatkan untuk 'menyentil' kelompok lain yang tidak sepeham atas dasar identitas. Saya mengamati di media sosial terdapat narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang tertentu untuk 'menyerang' kelompok lain dengan mengaitkan identitas penyumbang dan jumlah yang disumbangkan. Ketika ternyata informasi tersebut tidak terbukti, kelompok yang diserang membalas dengan narasi tandingan. Dampaknya muncul kegaduhan yang tidak perlu. Bagi saya hal ini sangat tidak baik terutama dalam menjaga keakraban berwarganegara.

Euforia ini sudah seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, apalagi di masa pandemi banyak orang akan lebih akrab dengan gawai dan mengakses internet. Kejadian ini seharusnya tidak terjadi lagi jika masyarakat lebih patuh dan disiplin pada prosesnet. □

Mohammad Eko Fitrianto
Dosen Fakultas Ekonomi,
Universitas Sriwijaya,
Mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen UGM.

Daulat Atas Ruang Hidup

Sutaryono

PERINGATAN 76 tahun Indonesia Merdeka perlu dijadikan momentum bersama untuk memaknai kembali arti kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah kemerdekaan yang kita rasakan bersama ini, juga memberikan jaminan atas ruang hidup bagi seluruh warga negara dan Bangsa Indonesia? Mengingat ruang hidup seluruh rakyat Indonesia saat ini, kian hari ada kecenderungan semakin sempit, akibat menguatnya tekanan global dan dunia internasional yang tanpa batas.

Menyempitnya ruang hidup tersebut secara kualitatif ditandai oleh: (1) ketersediaan pangan kita belum sepenuhnya mampu disediakan secara mandiri; (2) dengan luas daratan sekitar 1,9 juta km2 kita bermasalah dengan petani *landless* dan konflik baik konflik tanah, kawasan hutan, pertambangan maupun kawasan perkebunan; (3) dengan lapangan kerja terbatas, angkatan kerja melimpah, kita masih kebanjiran tenaga kerja asing; serta (4) dengan tersedianya ruang hidup yang sangat luas, kita belum mampu mewujudkannya untuk kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak Hidup

Secara tegas dan jelas konstitusi kita (UUD 1945) mengamanahkan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" (Pasal 28A). Untuk dapat mempertahankan hidup, disebutkan bahwa "etiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Pasal 27 ayat (2)). Sistem perekonomian diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Konstitusi menegaskan pula bahwa "Bumi dan air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah jaminan hak hidup bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hak hidup setiap warga negara sebagaimana di atas, memerlukan ruang yang memadai dan sesuai dengan kondisi wilayah yang ditempatinya sebagai ruang hidup. Ruang hidup tidak hanya dimaknai sebagai wilayah atau ruang fisik belaka, tetapi juga ruang mental dan ruang sosial. Secara normatif, ruang fisik telah dipahami sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU 26/2007). Ruang mental merupakan mindset dan pola pikir yang bersifat personal yang didasarkan pada keyakinan dan *stock of knowledge* yang dimilikinya. Sedangkan ruang sosial adalah ruang fisik atau non fisik (virtual) yang merupakan media interaksi sosial dan dibentuk oleh tindakan sosial baik bersifat individual maupun kolektif.

Mendeskripsikan

Kita ketahui bersama bahwa tema Peringatan HUT RI ke-76 ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tema tersebut mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan, agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Tema juga merepresentasikan adanya 'ruang' yang melambangkan

negara memberikan ruang demokrasi kepada rakyat untuk turut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia dalam mengupayakan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Dalam konteks ini implementasi dan internalisasi tema Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh ini membutuhkan kemerdekaan dan kebebasan setiap warga negara dan Bangsa Indonesia sebagai prasyaratnya. Bukan sekadar kebebasan dari belenggu kemerdekaan, tetapi kebebasan dan kedaulatan terhadap ruang hidup yang diberikan negara kepada setiap warga negara.

Apabila negara melalui pemerintah yang berkuasa mampu berdaulat dan memberikan ruang hidup bagi seluruh warga negara maka terwujudnya Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh adalah sebuah keniscayaan. Inilah yang saya maksudkan sebagai daulat atas ruang hidup. Semoga. □

**)Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanian Nasional dan Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM*

Pojok KR

Presiden minta biaya tes PCR diturunkan.
-- **Segera test yang lainnya musti diturunkan.**

Penanganan Covid jangan gagal focus.
-- **Apalagi gagal hasil.**

Di Gunungkidul, pelayanan SKCK sesuai SOP.
-- **Kebangetan kalau sampai ada calo.**

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriga Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandarkr@yahoo.com, iklandarkr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarang... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi Di s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan Raya Yogyakarta - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.